

Intisari Laporan Penelitian Keadilan Sosial di Pesisir

Peran Belanda dalam Proyek Pertahanan Pesisir dan Reklamasi

April 2017

Laporan lengkap dapat dilihat di:

- www.bothends.org/ncicd
- www.somo.nl/ncicd
- www.tni.org/ncicd

RINGKASAN PENELITIAN

Sebuah proyek infrastruktur yang bernilai multi-miliar dolar sedang berjalan di Indonesia, yaitu proyek yang ditujukan untuk melindungi kota Jakarta dari ancaman banjir di masa yang akan datang. *Master Plan* untuk program *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD)/Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara yang disusun oleh konsorsium terdiri dari ahli teknik dan perusahaan-perusahaan konsultasi Belanda. Pemerintah Belanda melalui anggaran bantuan pembangunannya, telah mendukung tahap rancangan dan kemungkinan akan tetap terlibat erat dengan proyek prestisius ini. Proyek ini adalah contoh utama dari pergeseran dalam kebijakan pembangunan Belanda sebagaimana ditetapkan dalam Agenda Baru untuk Bantuan, Perdagangan dan Investasi.

Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh SOMO, Both ENDS dan TNI menunjukkan bahwa NCICD dan proyek yang terkait di Teluk Jakarta cenderung merusak lingkungan dan bisa mengancam sumber kehidupan puluhan ribu orang yang bergantung pada usaha perikanan. Organisasi masyarakat sipil lokal

memiliki keprihatinan mendalam karena mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan dan perancangan proyek infrastruktur skala besar dan pemukiman mewah. Pada tahun 2014, mereka bergabung dengan kelompok masyarakat terdampak lainnya dan membentuk Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta.

Tidak diragukan lagi bahwa kebutuhan untuk melindungi Jakarta dari ancaman banjir sangat penting dan mendesak sehingga membutuhkan tindakan segera. Namun laporan penelitian ini, rupanya menimbulkan pertanyaan serius mengenai apakah pemerintah Belanda dalam upayanya mendukung NCICD telah cukup menyeimbangkan antara kepentingannya dalam mendukung perusahaan-perusahaan Belanda dengan komitmen kebijakan dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaan dari *Master Plan* NCICD yang telah berjalan saat ini tidak akan menawarkan warga Jakarta suatu solusi yang secara sosial, lingkungan dan finansial berkelanjutan dalam jangka panjang.

TANTANGAN: PENGELOLAAN AIR DI JAKARTA

Jakarta, ibukota Indonesia, adalah kota dengan penduduk berjumlah sekitar sepuluh juta orang yang terletak di Pulau Jawa. Kota ini dan sekitarnya menikmati perkembangan ekonomi yang pesat. Namun, di manapun juga di Indonesia ketimpangan antara yang miskin dan yang kaya begitu terasa. Kota ini juga menghadapi tantangan besar dalam hal pengelolaan air. Pada awal tahun 2007, menyusul hujan deras, 30% - 70% wilayah Jakarta tenggelam dan banjir terus terjadi setiap tahun selama musim hujan. Ancaman banjir meningkat dengan menurunnya kota secara bertahap di bawah permukaan laut. Apa yang disebutkan terakhir ini sebagian besar disebabkan oleh ekstraksi air tanah dalam jumlah besar untuk menyediakan kebutuhan air minum bagi penduduk yang jumlahnya terus berkembang pesat di kota ini. Pasokan air perpipaan sangat tidak memadai. Tantangan berat pengelolaan air lainnya adalah kerusakan lingkungan yang terjadi di Teluk Jakarta yang disebabkan oleh pencemaran yang terjadi di hulu. Ke-13 sungai yang bermuara di pesisir Jakarta dan dilepaskan ke laut mencemari pesisir dengan sampah rumah tangga, logam berat dan bahan kimia yang menghancurkan budidaya ikan dan hutan bakau.

NCICD: TIDAK MENJAWAB PERSOALAN

Setelah banjir yang merusak di tahun 2007, pemerintah Indonesia meminta Belanda untuk mengembangkan suatu rencana strategis dalam mengatasi ancaman banjir. Pemerintah Belanda menerima permintaan tersebut. Dibentuklah sebuah konsorsium yang terdiri dari perusahaan Belanda yang merancang rencana perlindungan pesisir untuk Jakarta, yang sebagian besar didanai melalui pos anggaran pemerintah Belanda untuk pengembangan kerjasama internasional (lihat kotak).

Pada tahun 2014, *Master Plan* NCICD ditampilkan di Jakarta. NCICD merupakan gabungan infrastruktur pertahanan pesisir skala besar, yaitu pembangunan tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta dengan pembangunan pemukiman mewah di pulau buatan, Garuda Megah akan menjadi wilayah baru di Jakarta. Total biaya investasi untuk proyek tersebut, yang akan

dikeluarkan dalam tiga fase, bisa meningkat hingga menjadi US\$ 40 miliar. Fase A, merupakan penguatan tanggul yang telah ada di pesisir Jakarta dan sudah dimulai. Fase B, merupakan pembangunan tanggul laut dan pulau buatan Garuda Megah, harus diwujudkan pada tahun 2025. Sedangkan Fase C, yang merupakan penutupan bagian timur Teluk Jakarta harus diwujudkan pada tahun 2040.

Sementara itu, perusahaan-perusahaan Belanda juga terlibat sebagai sub-kontraktor dalam proyek-proyek lainnya di Teluk Jakarta yang melibatkan pembangunan 17 pulau buatan yang dimaksudkan untuk menyediakan perumahan bagi warga berpenghasilan menengah ke atas. Proyek-proyek ini sangat ditentang oleh kelompok-kelompok lokal, yang akan diintegrasikan dalam rancangan proyek NCICD.

Pembiayaan Belanda untuk NCICD melalui Official Development Assistance (ODA)

Meskipun tidak ada gambaran menyeluruh yang tersedia tentang dukungan pemerintah Belanda terhadap NCICD, penelitian mengungkap bahwa pemerintah membiayai pengembangan Master Plan NCICD melalui dana *Official Development Assistance (ODA)*/Bantuan Pembangunan Resmi dengan dua bantuan dana sejumlah EUR 3,9 juta dan EUR 7,5 juta. Dana bantuan lain sejumlah EUR 500.000 diberikan melalui 'Partners for Water', sebuah program yang dibiayai oleh sejumlah kementerian. Dua sumber (belum dikonfirmasi oleh Kementerian terkait) menunjukkan bahwa Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan telah memberikan kontribusi sekitar EUR 1,5 juta per tahun untuk proyek NCICD. Dan terakhir, perusahaan pengerukan Belanda Boskalis menerima jaminan kredit ekspor dari lembaga penjamin Belanda Atradius Dutch State Business sejumlah maksimum mendekati EUR 210 juta untuk keterlibatannya dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta.



APA YANG SALAH DENGAN NCICD?

1. Proyek NCICD tidak menjawab permasalahan utama air di Jakarta: tenggelamnya kota Jakarta.

NCICD mengakui bahwa amblesan tanah di bawah permukaan air laut yang terjadi di Jakarta yang terus berlanjut merupakan penyebab utama dari ancaman banjir baik akibat banjir rob maupun sedimentasi sungai. Menghentikan proses amblesan tanah diidentifikasi sebagai prasyarat penting untuk “skenario apapun” untuk melindungi kota. Pun, tantangan yang mendesak adalah bagaimana menyediakan air minum yang aman untuk populasi yang berkembang pesat di Jakarta, selain melalui ekstraksi air tanah berlebihan yang menyebabkan terjadinya amblesan tanah, yang tidak memiliki bagian dalam rencana pembiayaan NCICD ini. Solusi yang ditawarkan adalah pembangunan mandiri tanggul laut raksasa di dalam Teluk Jakarta untuk melindungi kota

dalam menghadapi ancaman banjir rob saja. NCICD juga gagal untuk mengatasi pengolahan air limbah yang sangat tercemar (96% dari air limbah dibuang ke sungai dari hulu tanpa diolah) yang menimbulkan kekhawatiran besar bagi kualitas air di kota dan di Teluk.

2. Diperkirakan bahwa proyek NCICD mengancam sumber kehidupan puluhan ribu orang dan akan meningkatkan ketimpangan ekonomi. Nelayan lokal mengklaim bahwa reklamasi pesisir yang sedang berlangsung di Teluk Jakarta telah menyebabkan hilangnya wilayah tangkap mereka. Terlebih pembangunan pulau buatan yang mengancam sumber kehidupan mereka. Dampak sosial yang negatif ini akan semakin meningkat dengan pelaksanaan NCICD. Hal ini berarti orang-orang yang bergantung pada usaha perikanan di Teluk Jakarta akan semakin terpinggirkan, sementara pada saat yang sama proyek pemukiman mewah diwujudkan di wilayah Teluk yang sama.

3. Proyek NCICD akan menghancurkan lingkungan.

Pembangunan tanggul laut raksasa dan Garuda Megah sebagai kota berbatas-air akan mengurangi kapasitas pembilasan alami Teluk Jakarta, dimana ke-13 sungai yang tercemar berat akan bermuara. Hal ini menyebabkan kerusakan lebih parah dari kualitas air – beberapa pihak mengkhawatirkan Teluk akan menjadi ‘kubangan beracun’. Lebih lanjut, jumlah pasir yang sangat besar yang dibutuhkan untuk tanggul laut dan kota berbatas-air yang baru mungkin mendorong penambangan pasir ilegal di Indonesia dengan dampak yang negatif bagi lingkungan dan ekosistem.

4. Kurangnya konsultasi dan partisipasi publik bertentangan dengan komitmen yang dinyatakan oleh pemerintah Belanda terhadap Integrated Water Resources Management (IWRM)/Pengelolaan Sumberdaya Air yang Terintegrasi.

Prinsip kunci dalam IWRM adalah pengelolaan air berdasarkan pada pendekatan yang partisipatif di semua tingkatan, dengan konsultasi publik yang utuh dan pelibatan pengguna air setempat dalam perancangan skenario dan seleksi, perencanaan dan pelaksanaan proyek air. Pada kasus NCICD, komunitas setempat di Jakarta belum pernah sekalipun terlibat dalam konsultasi atau partisipasi yang

berarti dalam rancangan proyek yang akan mengancam sumber kehidupan dan lingkungan mereka. Prinsip lainnya dalam IWRM adalah pembangunan social dan ekonomi harus terkait dengan perlindungan ekosistem alami. Pun, dalam kasus NCICD, tidak pernah dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang menyeluruh. Pemerintah Belanda yang telah menginvestasikan jutaan Euro dari dana bantuan pembangunan ke proyek NCICD ini, dengan demikian telah gagal untuk mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan air itu sendiri.

5. Proyek NCICD tidak memenuhi tujuan dari kebijakan pembangunan pemerintah Belanda, padahal pemerintah telah menghabiskan dana ODA sejumlah EUR 11,4 juta dalam rancangan dan pengembangan proyek. NCICD mengancam sumber kehidupan para nelayan di Teluk Jakarta dan mereka yang bekerja di usaha yang terkait dengan sektor perikanan, misalnya pengolahan ikan, perbaikan kapal dan jala, dan lainnya.. Ini berarti bahwa proyek akan berkontribusi pada meningkatnya ketimpangan yang telah terjadi di Jakarta, yang bertentangan dengan tujuan dari kebijakan pembangunan pemerintah Belanda untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan yang inklusif. Risiko lingkungan yang ada dalam proyek ini bertentangan dengan tujuan pemerintah Belanda dalam pembangunan berkelanjutan. NCICD tidak hanya bertentangan dengan tujuan dari kebijakan pemerintah Belanda, namun juga melanggar beberapa prinsip yang tercantum dalam hukum internasional, seperti Konvensi tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang mencakup di dalamnya hak atas pekerjaan dan hak atas pangan. Kegagalan untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebelum merancang NCICD sama artinya bahwa pemerintah Belanda telah gagal untuk memenuhi komitmennya terhadap perjanjian internasional dalam praktik.

6. Proyek NCICD melepaskan risiko keuangan yang cukup besar ke negara Indonesia dan dapat menarik investor yang kontroversial. NCICD dimaksudkan untuk menjadi sebuah kerjasama pemerintah-swasta. Jaminan yang diberikan oleh negara, yang diperlukan untuk menarik pembiayaan swasta, mengimplikasikan bahwa pemerintah Indonesia menghadapi risiko keuangan yang tinggi jika pelaksanaan NCICD –selama lebih dari 20 tahun- tidak sesuai dengan rencana. Beberapa kunci risiko keuangan dan biaya yang tak terlihat, seperti biaya untuk relokasi dan kompensasi terhadap industry perikanan, untuk peningkatan kualitas air atau penyediaan pasokan air perpipaan, tidak terintegrasi dalam rencana bisnis NCICD. Kesemua ini bukan pertanda baik untuk keberlanjutan keuangan proyek. Terlebih proyek NCICD mungkin menarik investor yang kontroversial. Risiko ini sudah diilustrasikan oleh fakta bahwa selama fase perancangan NCICD, dua perusahaan Indonesia yang berkonsultasi dipimpin oleh orang yang terkait erat dengan militer Indonesia dan terlibat dalam kasus korupsi. Perusahaan lainnya, terkait dengan kebakaran hutan dan penggusuran masyarakat lokal, juga dihubungi.

APA YANG HARUS DILAKUKAN?

Penulis laporan dan mitranya di Indonesia memiliki keprihatinan yang mendalam tentang kehilangan sumber kehidupan dan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi serta kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki akibat proyek NCICD. Pengguna air setempat, nelayan, perempuan dan laki-laki yang bekerja di usaha-usaha perikanan skala kecil di sepanjang Teluk Jakarta ingin dan perlu dipastikan bahwa kepentingan mereka dipertimbangkan dan diatasi. Pemerintah Belanda akan terus memiliki peran dalam proyek NCICD di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, penulis meminta pemerintah untuk segera memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keterlibatan pemerintah Belanda di Teluk Jakarta, mengatasi baik perannya sendiri maupun perusahaan-perusahaan Belanda yang terlibat, sehingga sungguh-sungguh dengan tujuan dari kebijakan tentang Bantuan dan Perdagangan.

1. Pemerintah Belanda harus berkomitmen untuk memastikan bahwa kelompok kepentingan setempat, termasuk kelompok perempuan, terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan tentang NCICD yang mencakup prosedur formal, serta partisipasi mereka merupakan bagian dari proses transparansi. Komunitas setempat di Teluk Jakarta telah menyatakan dengan jelas keinginannya untuk bersama dengan perencana memikirkan solusi alternatif sehingga ada perbandingan yang layak antara keuntungan dan kerugian ekonomi dan lingkungan yang timbul akibat NCICD dalam jangka panjang, serta untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tidak terlanggar.
2. Pemerintah Belanda harus mematuhi komitmennya terhadap kerangka internasional untuk hak-hak ekonomi dan sosial, serta prinsip-prinsip Integrated Water Resource Management (IWRM) dalam praktik. Fakta bahwa proyek reklamasi pesisir di Indonesia sangat ditentang, digugat di pengadilan dan diperparah dengan dugaan korupsi, merupakan alasan tambahan bagi pemerintah Belanda untuk meningkatkan komitmen dan hanya terlibat dengan perusahaan (Belanda) yang secara terbuka berkomitmen dengan Pedoman OECD dan Prinsip-Prinsip Pedoman Bisnis dan Hak Asasi Manusia PBB.
3. Setiap keterlibatan lebih lanjut dengan NCICD, pemerintah Belanda harus berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang menyeluruh dan utuh. Kajian ini harus menginformasikan revisi penting dari NCICD, dan mempertimbangkan scenario lainnya untuk menghentikan amblesan tanah dan meningkatkan kualitas air, serta membandingkan pendekatan yang berbeda untuk menjamin keamanan dari ancaman banjir di Jakarta, dengan dan tanpa proyek reklamasi yang besar dan pemukiman mewah berikut tanggul laut raksasa. Kajian Lingkungan Hidup Strategis harus melibatkan kelompok-kelompok lokal yang saat ini dikecualikan dalam rancangan proyek dan proses pengambilan keputusan serta menilai dampak NCICD terhadap sumber kehidupan masyarakat setempat.
4. Prioritas utama yang harus dilakukan dalam NCICD adalah mengatasi penyebab utama ancaman tenggelamnya Jakarta, yaitu ekstraksi air tanah. Komitmen yang lebih kuat dari Belanda untuk membantu mencapai tujuan untuk menghentikan amblesan tanah sangat diperlukan. Pemerintah Belanda dan sektor air harus mengintegrasikan dua prasyarat untuk keberhasilan proyek NCICD –mengakhiri ekstraksi air tanah dan mengembangkan pengolahan air limbah- dalam rancangan dan pelaksanaan NCICD. Jika Jakarta tidak mengganti air tanah sebagai sumber utama dari air minum dengan air di permukaan, berarti bahwa penyedia air minum harus meningkatkan kapasitas produksinya, rencana pengolahan air yang baru harus dibangun dan masalah pencemaran air di hulu sungai harus diatasi. Hal ini memerlukan komitmen politik dan perencanaan jangka panjang bagi pemerintah Indonesia.
5. Pemerintah Belanda harus menggunakan dana dari anggaran kerjasama pembangunan untuk mendukung proyek-proyek yang betul-betul sesuai dengan tujuan dari agenda Bantuan dan Pembangunan –di atas kertas dan dalam praktiknya. Jika tidak, pemerintah Belanda akan menggagalkan ketimbang memajukan target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk semua. Pemerintah Belanda harus melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa proyek NCICD bertransformasi menjadi proses yang mencakup dialog dengan masyarakat setempat, mendatangkan alternative yang layak dan dipandu oleh hasrat untuk menemukan solusi yang berkelanjutan baik secara sosial maupun lingkungan.

Metodologi Penelitian

Penelitian untuk proyek ini dan laporannya dibuat oleh SOMO, Both ENDS dan TNI, bekerjasama dengan dua mitra di Indonesia, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Amrta Institute for Water Literacy. Penelitian mencakup kajian dokumen Rencana Utama NCICD dan tendernya; dokumen-dokumen terkait, termasuk konsultan dari Denmark (perusahaan DHI Water and Environment) dan Institut Teknologi Bandung; Putusan pengadilan tentang reklamasi pesisir yang tengah berjalan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wawancara juga dilakukan dengan ahli air lembaga penelitian Belanda Deltares dan UNESCO-IHE Institute for Water Education; nelayan di Jakarta; perwakilan dari Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta, Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Belanda serta Kementerian Luar Negeri. Semua pemangku kepentingan yang terlibat diberi kesempatan untuk memberikan komentar terhadap versi draft dari laporan ini.



Both ENDS
Connecting people for change

SOMO

tni
transnationalinstitute